



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 19 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 40 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah (PD), Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020;
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun sebelumnya

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan rancangan Renja dimulai dengan adanya surat edaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tanggal 16 Nopember 2018, Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Malang Tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.2002/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, yang menegaskan bahwa tiap PD wajib menyusun dan menyampaikan Renja PD kepada Bupati, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rancangan Renja yang kemudian bekerja menyusun rancangan Renja dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Renstra PD. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan KUA dan PPAS, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Renja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA PD. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum PD, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi.

Renja PD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang memuat kebijakan, program dan kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu: RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi dan Misi Madep Mantep Manetep yang telah dijabarkan dalam Renstra PD. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang berperan dalam mendukung **Misi ke 2** Bupati Malang yaitu **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.**

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020.

Sedangkan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
- c. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
- d. mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
- e. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MALANG

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2020

4.2 Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan
Anggaran Pertriwulan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2020

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan pemisahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sehingga Tahun 2017 menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang dan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah terbentuk dengan *program dan kegiatan yang tertera pada tabel 2.1 antara lain:*

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan 2 kegiatan;
7. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan;
8. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dengan 6 kegiatan.
9. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan;
10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan;

11. Sasaran Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra) antara lain:

1. Meningkatnya dan mengembangkan kemampuan aparatur dan memberikan pelayanan prima melalui program:
 - a. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan melaksanakan kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 10.000 surat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dengan target 36 rekening/bulan;
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12 OB;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target 51 jenis;
 5. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, dengan target 41 jenis;
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target 74 jenis;
 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target 6 Jenis;
 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 200 jenis;
 9. Penyediaan Makan & Minum, dengan target 7.354 HOK;
 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan target 100 HOK;
 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah, dengan target 200 HOK;
 12. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian, dengan target 15 dokumen.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan melaksanakan kegiatan yaitu:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 8 unit;
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan target 180 unit;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 9 ruangan;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Target 64 unit;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 188 unit.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan target 125 stel.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target 20 orang;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan kegiatan:
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target 20 Buku;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, target 550 Buku;
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, target 76 Buku.
2. Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengelolaan keuangan Desa melalui program:
 - a. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan kegiatan:
 1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes, target 1134 Aparatur Desa
 2. Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa, target 1134 Aparatur Desa
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengelolaan keuangan Daerah melalui program:
 - a. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 1. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan target 82 Buku
 2. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah, dengan target 12 Bulan
 3. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD, dengan target 15 BLUD
 4. Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah, dengan target 13.000 Berkas
 5. Pengelolaan Belanja Pegawai, dengan target 12 Bulan
 6. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 123 Dokumen

7. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, dengan target 75 Buku
- b. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah dengan kegiatan:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan target 390 Dokumen
 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, dengan target 410 Dokumen
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan target 260 Dokumen
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan target 560 Dokumen
 5. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah, dengan target 164 Orang
 6. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, dengan target 500 Dokumen
 7. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ DPA dan Perubahannya, dengan target 82 PD
- c. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan kegiatan:
1. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah, dengan target 82 PD
 2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan target 200 buku
 3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target 450 buku
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan target 450 dokumen
 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan target 550 dokumen
 6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target 2 Aplikasi
 7. Bimbingan teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target 164 orang

3. Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah melalui program:
 - a. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan target 82 PD
 2. Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah, dengan target 82 PD
 3. Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah, dengan target 500 Dokumen
 4. Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan target 82 Buku
 5. Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dengan target 82 Dokumen
 6. Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan target 82 PD

Kegiatan yang mencapai Prosentase realisasi anggaran sebesar 50 % keatas antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi anggaran sebesar 74,74%;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik sebesar 90,03%;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebesar 96,35%;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar 72,16 %;
5. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan sebesar 57,32 %;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 80,00%
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 84,34%
8. Penyediaan Makanan & Minuman sebesar 70,65 %;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar 73,78%
10. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian sebesar 57,28%;
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 71,70%;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar 56,34%
13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor sebesar 72,45%;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 52,25%
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar 75,50%
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar 69,12%

17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar 78,35%
18. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD sebesar 55,47%;
19. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD sebesar 56,56%;
20. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD sebesar 63,50%;
21. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD sebesar 53,62%;
22. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran / DPA dan Perubahannya sebesar 71,52%;
23. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes sebesar 65,29%;
24. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar 54,37%;
25. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah sebesar 73,49%;
26. Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah sebesar 83,41%;
27. Pengelolaan Belanja Pegawai sebesar 59,53%;
28. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar 66,19%;
29. Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah sebesar 55,63%
30. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 54,55%;
31. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar 98,06%;
32. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar 97,95%;
33. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 52,07%

Kegiatan yang mencapai kurang dari 50 % sebanyak 16 (Enam Belas) kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 37,24% dikarenakan tidak terlalu banyak perbaikan pada instalasi listrik
2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah tercapai sebesar 25,19% dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlalu banyak mendapatkan undangan ke luar daerah

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal tercapai sebesar 28,15 % dikarenakan kegiatan ini tidak dapat terserap maksimal sesuai dengan undangan mengikuti kursus, pelatihan, bintek dari Pusat maupun Propinsi sehingga dalam perencanaan tidak dapat dihitung secara jelas berapa kebutuhannya.
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD sebesar 38,64% dikarenakan kegiatan survey kepuasan masyarakat yang di tangguhkan pelaksanaannya.
5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran sebesar 48,36% dikarenakan adanya efisiensi anggaran
6. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah sebesar 38,84% dikarenakan sosialisasi dilakukan dengan tidak mengumpulkan orang tetapi melalui surat, menyetak pada dokumen sosialisasi melalui media elektronik lainnya.
7. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, 45,68% dikarenakan dilakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa utamanya karena banyaknya lembar dalam dokumen by nama by address yg lebih sedikit namun untuk jumlah buku/dokumen tetap sesuai target selain itu jumlah kegiatan rapat juga dibatasi dalam penyampaian informasi dilakukan melalui surat dan media komunikasi.
8. Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa sebesar 41,20% dikarenakan Penyelenggaraan Bimtek dilakukan efisiensi, yaitu diselenggarakan dikantor dengan waktu yang relatif singkat per harinya untuk menghindari biaya makan dan minum yang besar, namun demikian dengan jumlah hari yang cukup banyak disesuaikan dengan target yang direncanakan hal ini dilakukan untuk tetap mencapai target bimtek dapat lebih intensif namun dengan biaya yang lebih efisien.
9. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD sebesar 48,70% dikarenakan adanya efisiensi anggaran
10. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah sebesar 48,39% dikarenakan adanya efisiensi anggaran
11. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebesar 36,49% karena Kebutuhan tersebut berdasarkan permintaan dari PD
12. Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah sebesar 48,98% karena untuk memenuhi kegiatan tersebut sesuai dengan usulan PD
13. Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar 40,69% karena untuk memenuhi kegiatan tersebut sesuai dengan usulan

14. Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar 39,92% karena untuk memenuhi kegiatan tersebut sesuai dengan usulan PD
15. Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar 39,74% karena untuk memenuhi kegiatan tersebut sesuai dengan usulan PD
16. Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45,24% karena kegiatan didasarkan pada undangan bimtek

Sedangkan kegiatan yang tidak terserap sebanyak 2 (dua) kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tidak terserap karena tidak ada perubahan kebijakan Akuntansi
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terserap karena tidak ada Perubahan system dan prosedur

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD di tahun 2018 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1. Pada awal tahun 2018 ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah baru yang merupakan pemisahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Program-program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang yang realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
8. Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
9. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2019 hasil Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Memiliki Jumlah Program yang sama dengan tahun 2018 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
 8. Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
 9. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
 10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
- akan tetapi ada perbedaan pada Kegiatan yang berkurang satu yaitu pada program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes karena kegiatan ini telah selesai dilaksanakan di tahun 2018 sehingga di tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKAD dan Pencapaian Renstra BKAD s/d Tahun 2019
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%)	100%	100%	100%			100%	20.63%	20.63%	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Buah)	64.995 buah	9955 Surat	10.000surat	13591 surat	135.91	15.000 surat	38.546 surat	59.31	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah penyediaan listrik ,air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	36 rekening/bulan	36 rekening /bulan	36 rekening/ bulan	36 rekening /bulan	100.00	36 rekening/ bulan	36 rekening/b ulan	100	
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jaminan barang milik daerah yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	0	-	-	
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100.00	12 OB	36 bulan	60.00	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	51 Jenis	51 jenis	51 jenis	100.00	51 jenis	51 jenis	100.00	
6.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	41 Jenis	41 Jenis	41 Paket	41 Paket	100.00	41 Jenis	41 Jenis	100.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	74 Jenis	74 Jenis-	74 jenis	74 jenis	100.00	74 jenis	74 jenis	100.00	
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	200 Jenis	200 Jenis	200 Jenis	200 jenis	100.00	200 Jenis	200 Jenis	100.00	
9.	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	36.770 HOK	7.354 HOK	7.354 HOK	7351 HOK	99.96	7354 HOK	22.059 HOK	60.00	
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	480 HOK	190 HOK	200 HOK	59 HOK	59.00	30 HOK	279 HOK	58.12	
11.	Rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 HOK	180 HOK	200 HOK	157 HOK	78.50	40 HOK	377 HOK	75.40	
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100.00	6 jenis	6 jenis	100.00	
13.	Pengelolaan administrasi perkantoran dan pengendalian kepegawaian	Jumlah laporan pengendalian kepegawaian yang disusun secara periodic (Dokumen)	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 dokumen	100.00	15 dokumen	15 dokumen	100.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)	100 %	100%	100%	100%		100%	0.50%	0.50%	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional roda dua baru yang diadakan (Unit)	14 Unit	3 unit	8 Unit	8 Unit	100.00	1 Unit	12 Unit	85.71	
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	900 unit	180 unit	180 Unit	150 Unit	83.33	180 unit	510 unit	56.66	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Ruangan)	14 Ruangan	9 ruangan	9 ruangan	9 ruangan	100.00	14 ruangan	14 ruangan	100.00	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	64 Unit	64 unit	64 unit	49 Unit	76.56	64 Unit	64 Unit	100.00	
5.	Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	188 unit	188 unit	188 unit	177 unit	94.15	188 unit	188 unit	100.00	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %					100%	0.00	0.00	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	104.205 Stel	26.020 stel	125 stel	125 stel	100.00	26020 stel	52165 stel	50.05	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas pegawai diperangkat daerah (%)	100%					100%	0.00	0.00	
1.	Pendidikan & pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100 orang	20 orang	20 orang	11 orang	55.00	20 orang	51 orang	51.00	
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)	100%	100%	100%			100%	4.03	4.03	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	500 buku	100 buku	100 buku	20 buku	100.00	100 buku	220 buku	44.00	
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	2750 buku	550 buku	550 buku	110 buku	100.00	550 buku	1210 buku	44.00	
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah buku keuangan akhir tahun yang disusun	380 Buku	76 buku	76 buku	76 Buku	100.00	76 Buku	228 Buku	60.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
VI.	Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%					100%	100%	100.00	
1.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	Jumlah peserta Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes (Aparatur desa)	5670 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	100.00	0	1134 Aparatur Desa	20.00	
2.	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	5670 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	100.00	1134 Aparatur Desa	3402 Aparatur Desa	60.00	
VII.	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Prosentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%					100%	28.57%	28.57	
1.	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	410 buku	82 buku	82 buku	86 buku	104.88	82 buku	250 buku	60.97	
2.	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	36 bulan	60.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
3.	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	100.00	15 BLUD	15 BLUD	100.00	
4.	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	65.000 berkas	13000 berkas	13.000 berkas	11283 berkas	86.79	13.000 berkas	37283 berkas	57.35	
5.	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKPP yang dikeluarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	12 bulan	100.00	
6.	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	100.00	123 dokumen	123 dokumen	100.00	
7	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (Buku)	300 Buku	0	75 buku	75 buku	100.00	75 buku	150 buku	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
VIII.	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Prosentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%					100%	18.20	18.20	
1.	Investarisasi Barang Milik Daerah	Tercapainya laporan barang milik daerah yang akurat	-	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah perencanaan kebutuhan barang milik daerah	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	100.00	82 PD	82 PD	100%	
3.	Inventarisasi dan Validasi data barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang diinventarisir	82 PD	0	82 PD	82 PD	100.00	82 PD	82 PD	100%	
4.	Penatausahaan penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	500 Dokumen	0	500 dokumen	500 dokumen	100.00	500 dokumen	500 dokumen	100%	
5.	Pengamanan barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	82 Buku	0	82 buku	82 buku	100.00	82 buku	82 buku	100%	
6.	Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	82 Dokumen	0	82 dokumen	36 dokumen	43.90	82 dokumen	82 dokumen	100%	
7.	Penatausahaan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapuskan	82 PD	0	82 PD	45 PD	54.88	82 PD	82 PD	100%	
IX	Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah	Prosentase Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah	100%					100%	30.44	30.44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.	Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai criteria dan tepat waktu	1560 Dokumen	0	390 dokumen	390 dokumen	100.00	390 dokumen	780 dokumen	50.00	
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1640 Dokumen	0	410 dokumen	410 dokumen	100.00	410 dokumen	820 dokumen	50.00	
3.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah perda perubahan APBD sesuai criteria (Dokumen)	1040 Dokumen	0	260 dokumen	260 dokumen	100.00	260 dokumen	520 dokumen	50.00	
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah perbup penjabaran perubahan APBD sesuai criteria dan tepat waktu (dokumen)	2240 Dokumen	0	560 dokumen	560 dokumen	100.00	560 dokumen	1120 dokumen	50.00	
5.	Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	656 Orang	0	164 orang	164 orang	100.00	164 orang	328 orang	50.00	
6.	Peningkatan pengelolaan belanja hibah dan bantuan social dari APBD	Jumlah lampiran perbup tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan social (Dokumen)	2000 Dokumen	0	500 dokumen	500 dokumen	100.00	500 dokumen	1000 dokumen	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.	Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja anggaran PD dan perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan perubahannya	82 PD	0	82 PD	82 PD	100.00	82 PD	82 PD	100%	
X.	Program peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	Prosentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	100%	0	100%			100%	100%	100%	
1.	Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai criteria	82 PD	0	82 PD	82 PD	100.00	82 PD	82 PD	100.00	
2.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah	Jumlah buku pedoman kebijakan akuntansi yang disusun	200 Buku	0	200 buku	0	0.00	200 buku	200 buku	100.00	
3.	Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah buku system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1800 Buku	0	450 buku	0	0.00	450 buku	900 buku	50.00	
4.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	1800 Dokumen	0	450 dokumen	450 dokumen	100.00	450 dokumen	900 dokumen	50.00	
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	2200 Dokumen	0	550 buku	550 dokumen	100.00	550 dokumen	1100 dokumen	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th 2019	Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
6.	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah aplikasi system informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	2 Aplikasi	0	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100.00	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	
7.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	656 orang	0	164 orang	164 orang	100.00	164 orang	164 orang	100%	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menyiapkan Surat penyediaan Dana (SPD) dan registernya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Melakukan pengelolaan Belanja Pegawai;
- f. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji PNS dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- g. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pensiun serta tunjangan lainnya;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;
- i. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
- j. Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, pangkat, berkala, uang duka wafat, serta usulan gaji yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- k. Menyajikan cetak data gaji Perangkat Daerah;
- l. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana Perimbangan;
- m. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
- n. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dengan mengukur capaian kinerja dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel :
 - a. Nilai Opini BPK

- b. Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- c. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

Sasaran strategis diatas diukur dengan mengukur Nilai WTP yang diberikan oleh BPK dan Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yang terdiri dari:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan formula jumlah Laporan Keuangan yang sudah direkon banding dengan jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yaitu Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan dapat mempercepat penyusunan Raperda APBD dengan tepat waktu.

Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan dengan formula jumlah laporan keuangan yang tepat waktu banding dengan jumlah laporan keuangan PD. Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun dari kompilasi laporan keuangan PD yang telah terintegrasi dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 telah diselesaikan dan telah diaudit oleh BPK RI dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun tantangan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dapat mempertahankan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Tunai, Bidang Akuntansi dan Pelaporan telah memenuhi permintaan berupa data Laporan Realisasi APBD bulanan yang nantinya tiap bulan harus diupload di website resmi Kementerian Keuangan bersamaan dengan data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dari Bidang Anggaran dan Data Posisi Kas Bulanan dari Bidang Perbendaharaan. Diperlukan dukungan data entry pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil dalam memenuhi PMK

235/PMK.07/2015, sehingga untuk realisasi pendapatan diperlukan waktu yang sedikit lebih lama dibanding data entry realisasi belanja yang secara otomatis bisa terkoneksi dari Bidang Perbendaharaan.

Dalam Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyusunan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan handal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Persentase SPM PD yang sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	
2	Persentase RKA PD yang sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	
3	Persentase PD yang menyampaikan laporan sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase laporan inventaris BMD yang sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Usulan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD	-	✓	60%	65%	65%	65%	35%	65%	65%	65%	
6	Nilai Opini BPK	-	✓	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	
7	Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	✓	-	80%	85%	85%	-	80%	85%	85%	
8	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	-	✓	-	80%	85%	85%	-	80%	85%	85%	
Indikator Program-Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	✓	80%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	100%	
2	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	✓	80%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	✓	85%	100%	100%	100%	20%	100%	85%	100%	
4	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	✓	80%	100%	100%	100%	20%	100%	80%	100%	
5	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	✓	80%	100%	100%	100%	20%	100%	85%	100%	
6	Persentase Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	-	✓	80%	100%	100%	100%	50%	100%	90%	100%	
7	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	-	✓	80%	100%	100%	100%	60%	100%	90%	100%	
8	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	-	✓	80%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	
9	Persentase pengelolaan perbendaharaan Pemerintah Daerah	-	✓	80%	100%	100%	100%	60%	100%	90%	100%	
10	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi Perintah Daerah	-	✓	80%	100%	100%	100%	60%	100%	90%	100%	
Indikator Kegiatan-kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 baru yang diadakan (Unit)		✓	6 unit	1 unit	7 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38	Jumlah Peserta Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	✓	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	
39	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	-	✓	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	
40	Jumlah Pelaporan Dana Transfer yang dilaksanakan	-	✓	82 buku	82 buku	82 buku	82 buku	82 buku	82 buku	82 buku	82 buku	82 buku	
41	Jumlah Laporan Kas yang seimbang sehingga tidak defisit	-	✓	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
42	Jumlah BLUD yang dilakukan Pembinaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan terhadap PD yang Menerapkan PPK-BLUD	-	✓	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	
43	Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan	-	✓	13.000 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	4277 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	
44	Jumlah Penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	-	✓	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
45	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati Pembebanan, Pelunasan maupun Penghapusan	-	✓	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	53 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	
46	Jumlah Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD yang tersaji	-	✓	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	34 buku	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	
47	Jumlah PD yang dievaluasi dalam Penatausahaan keuangan sesuai Kriteria	-	✓	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	
48	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan Akuntansi yang disusun	-	✓	200 buku	200 buku	200 buku	200 buku	-	200 buku	200 buku	200 buku	200 buku	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Jumlah buku system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	-	✓	450 buku	450 buku	450 buku	450 buku	-	450 buku	450 buku	450 buku	
50	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	-	✓	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	
51	Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	-	✓	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	
52	Jumlah Aplikasi system Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	✓	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	
53	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	✓	164 orang	164 orang	164 orang	164 orang	-	164 orang	164 orang	164 orang	

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Keuangan dan Asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Permasalahan	Solusi
1	Sebagai tindak lanjut terbitnya PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penggantian terhadap Perda No 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kab Malang No 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD akan segera mengagendakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah	Pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang seluruh PD serta pemberian reward antara lain berupa honorarium
3	Lemahnya koordinasi antara Pegawai yang menagai keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus barang yang berakibat pada minimnya informasi yang didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset	Rekonsiliasi secara periodik antara pihak yang terkait, pengurus barang seluruh PD, dan BKAD dalam rangka pemutakhiran data SIMDA BMD
4	Keterbatasan aplikasi software yang dipergunakan dalam penatausahaan barang milik daerah	Berkoordinasi dengan pihak yang dapat menyediakan aplikasi software yang mampu mendukung penatausahaan barang milik daerah dan kebijakan akuntansi
5	Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan dan nilai perolehan	Berkoordinasi dengan pihak yang menyediakan aplikasi software agar menambahkan menu scan file dokumen perolehan aset. Agar softcopy dokumen peroleh dapat tersimpan dalam aplikasi SIMDA BMD

6	Penatausahaan Mutasi Barang Milik daerah yang tidak tertib	Kepala Perangkat Daerah segera mengajukan usulan persetujuan pengalihan BMD apabila terjadi mutasi barang daerah yang terjadi di instansinya
7	Perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang agar menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah minimal 1 kali dalam lima tahun kemudian hasilnya divalidasi dan dimutakhirkan pada SIMDA BMD • Pengurus barang seluruh OPD agar lebih cermat dalam melakukan pengisian informasi dan pemutakhiran data dalam SIMDA BMD terkait kondisi barang, nilai dan rincian barang
8	Masih terdapat selisih/perbedaan antara jumlah BPKP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di BKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan BPKB yang masih disimpan di instansinya kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola barang/BKAD dengan disertai dokumen tanda terima • Perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan BKAD dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KIB B secara periodik untuk menelusuri selisih data kendaraan yang tercatat di SIMDA BMD, fisik kendaraan di PD dan fisik BPKP yang tercatat di PD dan BKAD
9	Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya / rusak masih belum tertib	Membentuk Tim Teknis untuk memverifikasi dan memvalidasi aset yang rusak berat agar diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan
10	Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen pemanfaatan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain • Melakukan monitoring secara periodik atas jangka waktu pemanfaatan BMD dimaksud
11	Penatausahaan nomor register dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tidak tertib	Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan pengurus barang untuk menertibkan nomor register, kode lokasi serta memasang nomor register pada fisik aset tetap untuk pengamanan

12	Kapitalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat daerah	Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kapitalisasi aset agar menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penelusuran atas induk aset dan anak aset agar dapat melakukan proses kapitalisasi aset
13	Terhambatnya proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang merger, gabung dan pisah yang disebabkan :	
	a. Calon Pengguna Barang baru belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang	a. Koordinasi dengan pengguna barang baru agar segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang
	b. Usulan Data BMD dari Pengguna Barang Lama yang tidak sesuai dengan data SIMDA	b. BKAD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang, dan pengguna barang lama agar melakukan perbaikan data
	c. Terdapat BMD yang tidak ada Perangkat Daerah yang mau menerima pengalihannya	c. Menghimpun dan mencatat data BMD yang tidak diterima oleh calon pengguna barang baru

- **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan suatu dokumen perencanaan perangkat daerah yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, bagaimana yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang dengan **Visi Madep Mantep Manetep** yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Malang tersebut, BKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Renja tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD. Program Pembangunan pada misi ke 2 (dua) **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** terkait dengan misi tersebut Badan Keuangan Dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi tersebut diatas dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
8. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
9. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
10. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

TELAAHAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2020 :

Faktor Penghambat :

1. Adanya sebagian asset Pemerintah Kabupaten Malang yang riwayat perolehannya masih belum jelas
2. Sering terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari PD

Faktor Pendorong :

1. Melakukan penelusuran inventarisasi identifikasi dan konsolidasi dengan PD sebagai pengguna barang
2. Perangkat Daerah dengan system website online dengan system pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpusat dan dibuat secara online

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat;
- b. Diharapkan dalam penyusunan APBD dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) dapat tepat waktu;
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat;
- d. Berkoordinasi dan rekonsiliasi data dengan PD terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Memberikan bimbingan teknis kepada Aparat Desa terkait dengan Pengelolaan APBDes;
- f. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan bahkan mencari solusi juga merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;
- g. Kurang siapnya PD dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.3 ini disajikan perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan analisis kebutuhan, alasan proses dilakukan dan temuan/catatan penting perbedaan. Terdapat Perbedaan jumlah anggaran antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 dengan Hasil Analisis Kebutuhan dikarenakan adanya input kegiatan yang berulang, yaitu :

- a. Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan BMD
- b. Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD

Dan Perbedaan jumlah anggaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Hasil Analisis Kebutuhan dikarenakan pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Tahun 2018 tidak dianggarkan.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Malang

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		72.064.669.893,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		64.896.367.700,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	15.000 Surat	523.978.347,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	15.000 Surat	523.978.347,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik	Kab. Malang	Jumlah Penyediaan listrik, Air Minum/Air bersih, telekomunikasi dan internet	36 rekening /bulan	52.500.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik	Kab. Malang	Jumlah Penyediaan listrik, Air Minum/Air bersih, telekomunikasi dan internet	36 rekening/ bulan	52.500.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKAD	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 OB	16.675.215.146,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKAD	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 OB	16.675.215.146,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKAD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	51 Jenis	636.724.800,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKAD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	51 Jenis	536.724.800,00	
5	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	BKAD	Jumlah barang cetakan yang disediakan	41 Jenis	636.724.800,00	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	BKAD	Jumlah barang cetakan yang disediakan	41 Jenis	536.724.800,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik	74 Jenis	265.302.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik	74 Jenis	265.302.000,00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	200 Jenis	53.060.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	200 Jenis	53.060.400,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan makanan dan minuman	BKAD	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan (HOK)	7.354 HOK	265.302.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	BKAD	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan (HOK)	7.354 HOK	265.302.000,00	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	85 HOK	212.241.600,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	85 HOK	212.241.600,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Wilayah Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	100 HOK	106.120.800,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Wilayah Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	100 HOK	206.120.800,00	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	BKAD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Jenis	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	BKAD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Jenis	40.000.000,00	
12	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	BKAD	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang disusun secara Periodik	15 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	BKAD	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang disusun secara Periodik	15 Dokumen	150.000.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.773.449.600,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	1.773.449.600,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 baru yang diadakan	1 unit	500.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 baru yang diadakan	1 unit	500.000.000,00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	180 unit	530. 604.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	180 unit	530. 604.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 ruangan	265.302.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 ruangan	265.302.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	64 unit	371.422.800,00	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	64 unit	371.422.800,00	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKAD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	188 jenis	106.120.800,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKAD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	188 jenis	106.120.800,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKAD	Persentase Penunjang Kerja aparatur (%)	100%	6.000.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKAD	Persentase Penunjang Kerja aparatur (%)	100%	6.000.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKAD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	26.020 Stel	6.000.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKAD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	26.020 Stel	6.000.000.000,00	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKAD	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah (%)	100%	159.181.200,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKAD	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah (%)	100%	259.181.200,00	
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	BKAD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 orang	159.181.200,00	Pendidikan & Pelatihan Formal	BKAD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	20 orang	259.181.200,00	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	786.724.800,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	786.724.800,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja PD	BKAD	Jumlah dokumen SAKIP	100 buku	150.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja PD	BKAD	Jumlah dokumen SAKIP	100 buku	150.000.000,00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	550 buku	530.604.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	550 buku	530.604.000,00	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	380 buku	106.120.800,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	76 buku	106.120.800,00	
VI	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	BKAD	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%	3.972.797.000,00	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	BKAD	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%	3.972.797.000,00	
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BKAD	Jumlah PERDA APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	390 Dokumen	804.374.500,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BKAD	Jumlah PERDA APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	390 Dokumen	804.374.500,00	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	410 Dokumen	773.697.500,00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	410 Dokumen	773.697.500,00	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria	260 dokumen	748.801.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria	260 dokumen	748.801.000,00	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	560 dokumen	720.665.500,00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	560 dokumen	720.665.500,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah		Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	164 orang	212.310.500,00	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah		Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	164 orang	212.310.500,00	
6	Peningkatan Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD	BKAD	Jumlah lampiran perbub tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial	500 dokumen	448.294.500,00	Peningkatan Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD	BKAD	Jumlah lampiran perbub tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial	500 dokumen	448.294.500,00	
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahan	Kab. Malang	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam Penyusunan Perubahan RKA	82 PD	264.653.500,00	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan PD	Kab. Malang	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam Penyusunan Perubahan RKA	82 PD	264.653.500,00	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Pemenuhan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	955.087.200,00	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Pemenuhan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	955.087.200,00	
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	Kab. Malang	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	Kab. Malang	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Kab. Malang	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa	1134 Aparatur desa	477.543.600,00	Penigkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Kab. Malang	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa	1134 Aparatur desa	477.543.600,00	
VIII	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	100%	2.846.899.200,00	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	100%	2.846.899.200,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengendalian dan Pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	BKAD	Jumlah Pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	82 buku	212.241.600,00	Pengendalian dan Pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	BKAD	Jumlah Pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	82 buku	212.241.600,00	
2	Peningkatan dan Pengendalian manajemen kas daerah	BKAD	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 bulan	530.604.000,00	Peningkatan dan Pengendalian manajemen kas daerah	BKAD	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 bulan	530.604.000,00	
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	BKAD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	212.241.600,00	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	BKAD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	212.241.600,00	
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	BKAD	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan	13.000 berkas	530.604.000,00	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	BKAD	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan	13.000 berkas	530.604.000,00	
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	BKAD	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	530.604.000,00	Pengelolaan Belanja Pegawai	BKAD	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	530.604.000,00	
6	Penanganan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	BKAD	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati Pembebanan, Pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	530.604.000,00	Penanganan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	BKAD	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati Pembebanan, Pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	530.604.000,00	
7	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	BKAD	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji	75 buku	300.000.000,00	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	BKAD	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji	75 buku	300.000.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pelaporan dan akuntansi Pemerintah Daerah	100%	3.724.807.000,00	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pelaporan dan akuntansi Pemerintah Daerah	100%	3.724.807.000,00	
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	600.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	600.000.000,00	
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah	BKAD	Jumlah buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun	200 buku	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah	BPKAD	Jumlah buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun	200 buku	100.000.000,00	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 buku	200.000.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 buku	200.000.000,00	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	450 dokumen	915.763.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	450 dokumen	915.763.000,00	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	550 dokumen	909.044.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	550 dokumen	909.044.000,00	
6	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BKAD	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 aplikasi	500.000.000,00	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 aplikasi	500.000.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2020/RKPD 2019 Perkiraan Maju 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	BKAD	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah	164 orang	500.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah	164 orang	500.000.000,00	
X	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	100%	3.387.000.000,00	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		3.128.500.000,00	
1	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	PD Kab Malang	Jumlah pedoman Standar Satuan Harga (SSH)	82 PD	500.000.000,00	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	PD Kab Malang	Jumlah pedoman Standar Satuan Harga (SSH)	82 PD	500.000.000,00	
2	Inventarisasi dan Validasi data barang milik daerah	BKAD	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	712.000.000,00	Inventarisasi dan Validasi data barang milik daerah	BKAD	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	712.000.000,00	
3	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	500 dokumen	831.250.000,00	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	500 dokumen	831.250.000,00	
4	Pengamanan Barang Milik daerah	Kab. Malang	Jumlah Barang Milik daerah Yang dihapus/dipindahtangkan	82 Buku	593.750.000,00	Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik daerah	Kab. Malang	Jumlah Barang Milik daerah Yang dihapus/dipindahtangkan	82 Buku	593.750.000,00	
5	Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban BMD yang disusun	82 dokumen	450.000.000,00	Penyusunan Pertanggungjawaban laporan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban BMD yang disusun	82 dokumen	450.000.000,00	
6	Penatausahaan Penghapusan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah status penggunaan BMD yang ditetapkan	82 PD	300.000.000,00	Penetapan status penggunaan BMD	BKAD	Jumlah status penggunaan BMD yang ditetapkan	82 PD	300.000.000,00	
			JUMLAH		95.670.615.893,00					95.670.615.893,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan Musrenbang yang telah diadakan oleh Badan Perencanaan Kabupaten Malang belum ada usulan program/kegiatan dari masyarakat yang ditujukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang seperti yang ditera pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<div data-bbox="889 483 1779 708" style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block;">NIHIL</div>					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dari pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan;
- c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset/Barang Daerah yaitu inventarisasi Asset Daerah guna penilaian dalam rangka penyajian dalam Neraca yang sesuai dengan kondisi serta pengamanan Aset Daerah dengan Sertifikasi Aset sehingga terwujud kepastian kepemilikan.
- d. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Malang yang mendapatkan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi dan performance Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Daerah;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel;

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang

tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dirumuskan sasaran.

Sasaran Renja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya dan mengembangkan kemampuan aparatur dan memberikan pelayanan prima;
2. Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengelolaan barang milik daerah;

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan statejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Adapun program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan dalam bentuk tabel 3.1 yang dirumuskan sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

dengan kegiatan :

1. **Penyediaan Jasa Surat menyurat**, kegiatan ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional pada masing-masing bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat lingkungan Kabupaten maupun di tingkat Propinsi maupun ditingkat pusat dalam melaksanakan urusan umum;
2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** kegiatan komunikasi ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional bidang-bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Propinsi dan ditingkat pusat sedangkan sumber daya air dan listrik untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan BKAD;
3. **Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**, kegiatan ini berupa belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah;
4. **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, kegiatan ini berupa belanja Pegawai yang diperuntukkan untuk Honorarium PNS dan Non PNS dalam upaya mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
5. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**, kegiatan ini merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor;
6. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, kegiatan ini merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk cetak dan penggandaan;

7. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, kegiatan ini digunakan untuk pengadaan belanja modal instalasi listrik dan telepon;
8. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, kegiatan ini digunakan kesediaan bahan logistik dalam kelancaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. **Penyediaan Makanan dan Minuman**, kegiatan ini digunakan untuk belanja makan minum rapat dan makan minum tamu, serta makan minum pegawai;
10. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**, kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan badan dan akomodasi keluar daerah;
11. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah**, kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan badan dan akomodasi dalam daerah;
12. **Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan SDM Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
13. **Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian**, kegiatan ini digunakan untuk terlaksananya tertib Administrasi dan Tata Laksana dan Surat Menyurat serta pengendalian kepegawaian

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR dengan kegiatan :

1. **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**, kegiatan ini dititik beratkan pada belanja modal pengadaan peralatan perkantoran, pengadaan perlengkapan kantor, mebelair, alat-alat elektro, alat komunikasi;

2. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan dari sarana dan prasarana;
3. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan kendaraan badan/operasional;
4. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan Peralatan Gedung Kantor.
5. **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menunjang kelancaran operasional kantor;

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR dengan kegiatan :

1. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengadaan seragam pakaian dinas agar dapat terwujud aparatur yang disiplin pada saat melakukan kedinasan.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR dengan kegiatan :

1. **Pendidikan dan Pelatihan Formal**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengirimkan staf dalam kursus-kursus singkat/pelatihan, mengikuti sosialisasi, dan mengikuti bimbingan teknis. Asistensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini dimasukkan dalam sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan menunjuk Pocal Poin Responsif Gender. Sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Perangkat Daerah yang ikut mendukung Kabupaten Malang sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak.

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dengan kegiatan :

1. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perencanaan kegiatan selanjutnya;
2. **Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan semester. Dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. **Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan tahunan. Dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. **Survei Kepuasan Masyarakat**, Tujuan kegiatan ini untuk mengukur tingkat Kepuasan Perangkat Daerah yang dilayani BPKAD.

VI. PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. **Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah

untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD;

4. **Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. **Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah**; Tujuan kegiatan untuk mensosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan Daerah bagi PD;
6. **Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD**, Tujuan kegiatan untuk memonitoring belanja hibah dan bantuan sosial;
7. **Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya**, Tujuan kegiatan untuk mengevaluasi dan melakukan pendampingan bagi PD dalam rangka penyusunan RKA dan Perubahannya sekaligus pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini dimasukkan dalam sub kegiatan Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya. Sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Perangkat Daerah yang ikut mendukung Kabupaten Malang sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak.

VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dengan kegiatan :

1. **Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes**, Tujuan kegiatan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi pada aparat Pemerintah desa dalam rangka penyusunan APBDes;
2. **Peningkatan Penatausahaan Anggaran desa**, Tujuan kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan anggaran desa;

VIII. PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. **Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah**, tujuan kegiatan untuk mengevaluasi Perangkat Daerah dalam penatausahaan keuangan daerah;
2. **Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan serta mendukung penatausahaan keuangan daerah;
3. **Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah**, Tujuan ini adalah untuk memberikan serta mendukung mekanisme pengelolaan Keuangan agar bisa efektif, efisien dan Akuntabel;
4. **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. **Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. **Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mempermudah penyusunan dan aksesibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. **Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk PD;

IX. PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

dengan kegiatan :

1. **Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, Tujuan kegiatan untuk melakukan koordinasi dan Pelaporan dana-dana transfer yang telah direalisasikan serta menyusun rekonsiliasi;
2. **Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat administrasi Penatausahaan Keuangan Kas Daerah dengan Bank Jatim sebagai pemegang Kas Daerah;
3. **Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD**, Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mendukung serta melakukan pembinaan administrasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. **Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini mewujudkan tertib administrasi Penatausahaan belanja daerah;
5. **Pengelolaan Belanja Pegawai**, Kegiatan ini untuk mendukung dan meningkatkan data-data pegawai khususnya penatausahaan pembayaran gaji pegawai serta data – data administrasi;
6. **Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi**, Kegiatan ini diperlukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) khususnya dalam penerbitan Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), Surat Ketetapan Pembebanan, Surat Ketetapan Pelunasan maupun Surat Ketetapan Penghapusan;
7. **Peningkatan Manajemen Investasi Daerah**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan manajemen investasi daerah terhadap BUMD.

X. PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH

dengan kegiatan :

1. **Inventarisasi Barang Milik Daerah**, Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan laporan Barang Milik Daerah yang akurat;
2. **Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;

3. **Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk menginventarisir dan memvalidasi data BMD;
4. **Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk tertib administrasi dalam penatausahaan penggunaan BMD;
5. **Pengamanan BMD**, tujuan kegiatan ini untuk mengamankan BMD;
6. **Penatausahaan Pemanfaatan BMD**, tujuan kegiatan ini untuk tertib administrasi dalam penatausahaan dan pemanfaatan BMD
7. **Penatausahaan Penghapusan BMD**, tujuan kegiatan ini untuk penerbitan SK Bupati sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daserah									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	71.964.669.893,00	APBD		100%	73.030.947.228,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	BKAD	15.000 Surat	523.978.347,00	APBD		15.000 Buah	634.457.914,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kabupaten Malang	36 Rekening /bulan	52.500.000.000,00	APBD		36 Rekening /bulan	52.500.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah Jaminan Barang Milik Daerah yang disediakan (jenis)	-	-	-	APBD		-	-	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	BKAD	12 OB	16.675.215.146,00	APBD		12 OB	17.487.503.386,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	BKAD	51 Jenis	536.724.800,00	APBD		51 Jenis	649.459.296,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	BKAD	41 Jenis	536.724.800,00	APBD		41 Jenis	649.459.296,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	BKAD	74 Jenis	265.302.000,00	APBD		74 Jenis	270.608.040,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	BKAD	200 Jenis	53.060.400,00	APBD		200 Jenis	54.121.608,00	
9	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	BKAD	7.354 HOK	265.302.000,00	APBD		7.354 HOK	270.608.040,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	85 HOK	212.241.600,00	APBD		90 HOK	216.486.432,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab Malang	100 HOK	206.120.800,00	APBD		100 HOK	108.243.216,00	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	BKAD	6 Jenis	40.000.000,00	APBD		6 Jenis	40.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	BKAD	15 Dokumen	150.000.000,00	APBD		15 Dokumen	150.000.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	1.773.449.600,00			100%	1.798.918.592,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	BKAD	1 unit	500.000.000,00	APBD		1 unit	500.000.000,00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kab Malang	180 Unit	530.604.000,00	APBD		180 Unit	541.216.080,00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BKAD	14 Ruangan	265.302.000,00	APBD		14 Ruangan	270.608.040,00	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	64 Unit	371.422.800,00	APBD		64 Unit	378.851.256,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BKAD	188 Unit	106.120.800,00	APBD		188 Unit	108.243.216,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	6.000.000.000,00			100%	6.000.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	BKAD	26.020 Stel	6.000.000.000,00	APBD		26.020 Stel	6.000.000.000,00	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	259.181.200,00			100%	162.364.824,00	
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	BKAD	20 orang	259.181.200,00	APBD		20 orang	162.364.824,00	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	786.724.800,00			100%	799.459.296,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	BKAD	100 Buku	150.000.000,00	APBD		100 Buku	150.000.000,00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	BKAD	550 Buku	530.604.000,00	APBD		550 Buku	541.216.080,00	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	BKAD	76 Buku	106.120.800,00	APBD		76 Buku	108.243.216,00	
VI	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)		100%	3.972.797.000,00			100%	3.972.797.000,00	
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	BKAD	390 Dokumen	804.374.500,00	APBD		390 Dokumen	804.374.500,00	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	BKAD	410 Dokumen	773.697.500,00	APBD		410 Dokumen	773.697.500,00	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	BKAD	260 Dokumen	748.801.000,00	APBD		260 Dokumen	748.801.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	BKAD	560 Dokumen	720.665.500,00	APBD		560 Dokumen	720.665.500,00	
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	BKAD	164 Orang	212.310.500,00	APBD		164 Orang	212.310.500,00	
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	BKAD	500 Dokumen	448.294.500,00	APBD		500 Dokumen	448.294.500,00	
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya	Kabupaten Malang	82 PD	264.653.500,00	APBD		82 PD	264.653.500,00	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100%	955.087.200,00			100%	974.188.944,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBdes (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	APBD		1134 Aparatur Desa	487.094.472,00	
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	APBD		1134 Aparatur Desa	487.094.472,00	
VIII	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah		100%	3.724.807.000,00			100%	3.724.807.000,00	
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	BKAD	82 PD	600.000.000,00	APBD		82 PD	600.000.000,00	
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	BKAD	200 Buku	100.000.000,00	APBD		200 Buku	100.000.000,00	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	BKAD	450 Buku	200.000.000,00	APBD		450 Buku	200.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	BKAD	450 Dokumen	915.763.000,00	APBD		450 Dokumen	915.763.000,00	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	BKAD	550 Dokumen	909.044.000,00	APBD		550 Dokumen	909.044.000,00	
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	BKAD	2 Aplikasi	500.000.000,00	APBD		2 Aplikasi	500.000.000,00	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	BKAD	164 Orang	500.000.000,00	APBD		164 Orang	500.000.000,00	
IX	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah		100%	2.846.899.200,00			100%	2.897.837.184,00	
1	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	BKAD	82 Buku	212.241.600,00	APBD		82 Buku	216.486.432,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	BKAD	12 Bulan	530.604.000,00	APBD		12 Bulan	541.216.080,00	
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	BKAD	15 BLUD	212.241.600,00	APBD		15 BLUD	216.486.432,00	
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	BKAD	13000 Berkas	530.604.000,00	APBD		13000 Berkas	541.216.080,00	
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	BKAD	12 Bulan	530.604.000,00	APBD		12 Bulan	541.216.080,00	
6	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	BKAD	123 Dokumen	530.604.000,00	APBD		123 Dokumen	541.216.080,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)	BKAD	75 Buku	300.000.000,00	APBD		75 Buku	300.000.000,00	
X	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah		100%	3.387.000.000,00			100%	3.487.000.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	BKAD	82 PD	500.000.000,00	APBD		82 PD	600.000.000,00	
	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	BKAD	500 Dokumen	831.250.000,00	APBD		500 Dokumen	831.250.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	BKAD	82 Buku	593.750.000,00	APBD		82 Buku	593.750.000,00	
	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	BKAD	82 PD	712.000.000,00	APBD		82 PD	712.000.000,00	
	Penatausahaan Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	BKAD	82 Dokumen	450.000.000,00	APBD		82 Dokumen	450.000.000,00	
	Penatausahaan Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapuskan	BKAD	82 PD	300.000.000,00	APBD		82 PD	300.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL				95.670.615.893,00				96.848.320.068,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah, saat ini sudah sesuai dengan pagu dan anggaran yang ditetapkan dalam RKPD yang tertuang dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020
Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daerah						
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	71.964.669.893,00	APBD	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	BKAD	15.000 Surat	523.978.347,00	APBD	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kabupaten Malang	36 Rekening/bulan	52.500.000.000,00	APBD	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah Jaminan Barang Milik Daerah yang disediakan (jenis)	-	-	-	APBD	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	BKAD	12 OB	16.675.215.146,00	APBD	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	BKAD	51 Jenis	536.724.800,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	BKAD	41 Jenis	536.724.800,00	APBD	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	BKAD	74 Jenis	265.302.000,00	APBD	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	BKAD	200 Jenis	53.060.400,00	APBD	
9	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	BKAD	7.354 HOK	265.302.000,00	APBD	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	85 HOK	212.241.600,00	APBD	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab Malang	100 HOK	206.120.800,00	APBD	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	BKAD	6 Jenis	40.000.000,00	APBD	
13	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	BKAD	15 Dokumen	150.000.000,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	1.773.449.600,00		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	BKAD	1 unit	500.000.000,00	APBD	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kab Malang	180 Unit	530.604.000,00	APBD	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BKAD	14 Ruangan	265.302.000,00	APBD	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	64 Unit	371.422.800,00	APBD	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BKAD	188 Unit	106.120.800,00	APBD	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	6.000.000.000,00		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	BKAD	26.020 Stel	6.000.000.000,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	259.181.200,00		
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	BKAD	20 orang	259.181.200,00	APBD	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	786.724.800,00		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	BKAD	100 Buku	150.000.000,00	APBD	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	BKAD	550 Buku	530.604.000,00	APBD	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	BKAD	76 Buku	106.120.800,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)		100%	3.972.797.000,00		
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	BKAD	390 Dokumen	804.374.500,00	APBD	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	BKAD	410 Dokumen	773.697.500,00	APBD	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	BKAD	260 Dokumen	748.801.000,00	APBD	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	BKAD	560 Dokumen	720.665.500,00	APBD	
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	BKAD	164 Orang	212.310.500,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	BKAD	500 Dokumen	448.294.500,00	APBD	
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya	Kabupaten Malang	82 PD	264.653.500,00	APBD	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100%	955.087.200,00		
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBdes (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	APBD	
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah		100%	3.724.807.000,00		
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	BKAD	82 PD	600.000.000,00	APBD	
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	BKAD	200 Buku	100.000.000,00	APBD	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	BKAD	450 Buku	200.000.000,00	APBD	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	BKAD	450 Dokumen	915.763.000,00	APBD	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	BKAD	550 Dokumen	909.044.000,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	BKAD	2 Aplikasi	500.000.000,00	APBD	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	BKAD	164 Orang	500.000.000,00	APBD	
IX	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah		100%	2.846.899.200,00		
1	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	BKAD	82 Buku	212.241.600,00	APBD	
2	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	BKAD	12 Bulan	530.604.000,00	APBD	
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	BKAD	15 BLUD	212.241.600,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	BKAD	13000 Berkas	530.604.000,00	APBD	
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	BKAD	12 Bulan	530.604.000,00	APBD	
6	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	BKAD	123 Dokumen	530.604.000,00	APBD	
7	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)	BKAD	75 Buku	300.000.000,00	APBD	
X	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah		100%	3.387.000.000,00		
1	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	BKAD	82 PD	500.000.000,00	APBD	
2	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	BKAD	500 Dokumen	831.250.000,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	BKAD	82 Buku	593.750.000,00	APBD	
4	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	BKAD	82 PD	712.000.000,00	APBD	
5	Penatausahaan Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	BKAD	82 Dokumen	450.000.000,00	APBD	
6	Penatausahaan Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapuskan	BKAD	82 PD	300.000.000,00	APBD	
	JUMLAH TOTAL				95.670.615.893,00		

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daserah				5	15	25	55	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	71.964.669.893,00	15	20	30	35	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15.000 Surat	523.978.347,00	10	15	35	40	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening/bulan	52.500.000.000,00	15	20	30	35	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah Jaminan Barang Milik Daerah yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	16.675.215.146,00	15	20	25	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	536.724.800,00	10	25	30	35	
6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	41 Jenis	536.724.800,00	7	15	23	55	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	74 Jenis	265.302.000,00	2	3	15	80	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	200 Jenis	53.060.400,00	5	10	15	70	
9	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	7.354 HOK	265.302.000,00	10	15	25	50	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	85 HOK	212.241.600,00	0	10	10	80	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	100 HOK	206.120.800,00	10	15	15	60	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	6 Jenis	40.000.000,00	10	20	20	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
13	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	15 Dokumen	150.000.000,00	5	15	25	55	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.773.449.600,00	5	10	15	70	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	1 unit	500.000.000,00	0	0	0	100	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	180 Unit	530.604.000,00	0	0	0	100	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	14 Ruangan	265.302.000,00	0	10	25	65	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	64 Unit	371.422.800,00	5	15	30	50	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	188 Unit	106.120.800,00	0	0	15	85	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	6.000.000.000,00	0	0	0	100	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	26.020 Stel	6.000.000.000,00	0	0	0	100	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	259.181.200,00	0	2	1	97	
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 orang	259.181.200,00	0	2	1	97	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	786.724.800,00	10	25	10	55	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	100 Buku	150.000.000,00	15	20	20	45	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	550 Buku	530.604.000,00	0	47	0	53	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	76 Buku	106.120.800,00	15	5	5	75	
VI	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%	3.972.797.000,00	10	20	35	35	
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	390 Dokumen	804.374.500,00	15	35	15	35	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	410 Dokumen	773.697.500,00	15	35	15	35	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	260 Dokumen	748.801.000,00	0	10	60	30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	560 Dokumen	720.665.500,00	0	10	60	30	
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	164 Orang	212.310.500,00	15	15	30	40	
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	500 Dokumen	448.294.500,00	15	20	20	45	
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya	82 PD	264.653.500,00	10	20	30	40	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	955.087.200,00	0	0	0	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBdes (Aparatur Desa)	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	0	0	0	100	
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	0	0	0	100	
VIII	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	100%	3.724.807.000,00	20	15	40	25	
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	600.000.000,00	26	13	26	35	
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	200 Buku	100.000.000,00	0	0	100	0	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 Buku	200.000.000,00	0	0	100	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	450 Dokumen	915.763.000,00	27	27	46	0	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	550 Dokumen	909.044.000,00	26	26	48	0	
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	2 Aplikasi	500.000.000,00	14	27	17	42	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	164 Orang	500.000.000,00	51	0	0	49	
IX	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%	2.846.899.200,00	10	25	30	35	
1	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	82 Buku	212.241.600,00	10	25	30	35	
2	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 Bulan	530.604.000,00	5	30	30	35	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	212.241.600,00	10	25	30	35	
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	13000 Berkas	530.604.000,00	5	30	30	35	
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 Bulan	530.604.000,00	5	30	30	35	
6	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	123 Dokumen	530.604.000,00	5	30	30	35	
7	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)	75 Buku	300.000.000,00	5	20	45	30	
X	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%	3.387.000.000,00	3	15	35	47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	82 PD	500.000.000,00	0	10	40	50	
2	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	82 PD	831.250.000,00	10	20	30	40	
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	82 PD	593.750.000,00	0	15	30	55	
4	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	712.000.000,00	10	15	40	35	
5	Penatausahaan Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100 Dokumen	450.000.000,00	0	15	35	50	
6	Penatausahaan Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapuskan	100 Dokumen	300.000.000,00	0	15	35	50	
	JUMLAH TOTAL			95.670.615.893,00					

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan prioritas Pelayanan Administrasi Keuangan dalam rangka Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang, serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan program pelayanan sesuai dengan program pembangunan dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, diharapkan dapat terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI